

KERUGIAN HIDROMETEOROLOGI RP 35 JUTA

Anggaran Penanggulangan Bencana Rp 2,5 Miliar

WONOSARI (KR) - Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Selasa (21/1) lalu menimbulkan kerugian sebesar Rp 35 juta. Meskipun ada 49 rumah dan fasilitas umum yang rusak, tidak ada rumah yang roboh. Kerusakan rumah rata-rata tertimpa pohon yang tumbang.

Badan Penanggulanagn Bencana Daerah (BPBD) selain menerjunkan tim rekasi cepat (TRC) untuk memotong-motong kayu yang tumbang juga mengirim bantuan permakanan dan juga terpal ke wilayah yang terkena bencana, dalam hal ini Wonosari, Playen, Nglipar, Ponjong, Ka-

rangmojo, Semin dan Ngawen.

"Khuaus untuk di Kalurahan Kelor penanganan bersama PLN karena ada satu tiang listrik roboh dan satu hampir roboh," kata Kepala Bidang Kebencanaan BPBD Kabupaten Gunungkidul Sumadi SE, Kamis (23/1)

Sementara untuk menangani bencana tahun 2025 pemerintah mengalokasikan 2,5 miliar. Meski teranggarkan, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk melakukan upaya-upaya preventif, dalam hal ini melakukan pemangkasan pohon-pohon yang rindang, baik yang berdekatan dengan rumah maupun berada di tepi jalan.

Rabas-rabas ini penting untuk menghindari pohon tumbang kemudian menimpa rumah. Diingatkan kembali, mesayarakat perlu membaca peta rawan bencana, dalam ini angin puting beliung dan tanah longsor.

Ada 7 kapanewon yang potensi terkena angin outing beliung , antara lain, Semanu, Paliyan, Karangmojo, Playen, Wonosari, Rongkop dan Semin.

Bencana tanah longsor juga mengancam di Kapanewon Semin, Ngawen, Nglipar, Gedangsari dan Patuk. Kapanewon Semin potensi terancam dua-duanya, bencana puting beliung dan tanah longsor sekaligus, tambahnya. (Ewi)



Petugas BPBD dan PLN saat tangani pohon dan tiang listrik yang tumbang di Kelor, Karangmojo

KR-Endar Widodo

BEDAH KISI-KISI DI PATUK

Tingkatkan Kompetensi Guru



KR-Dedy EW

Peserta bedah Kisi-kisi di Patuk.

WONOSARI (KR) - Menghadapi pelaksanaan assessment Pendidikan Standarisasi Daerah (ASPD), Tim Ultra Kedaulatan Rakyat (KR) bekerjasama dengan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Korwilbiddik) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) mengadakan bedah kisi-kisi di SDN Patuk 1, Kamis (23/1). Kegiatan diikuti guru perwakilan dari 29 satuan pendidikan yakni SD dan MI.

"Harapannya guru nantinya bisa melaksanakan pembelajaran berkualitas. Mampu menerapkan metode variatif, sehingga siswa dapat memahami materi Pelajaran dengan baik," kata Ketua Korwilbiddik Kapanewon Patuk, Samsuedi SPD MPd.

Pembukaan bedah kisi kisi juga dihadiri Pengawas Kadarisman MPd, pengurus K3S, dan peserta bedah kisi-kisi. Di-

gram ini guru diharapkan bisa mempersiapkan ASPD yang diselenggarakan tahun ini lebih baik lagi. Terutama bagi siswa kelas VI nantinya untuk banyak berlatih. Sehingga pengalaman mengikuti bedah kisi-kisi ini memberikan manfaat cukup besar dalam mencapai penyelenggaraan dan keberhasilan dalam menghadapi ASPD. "Guru nanti perlu memberikan banyak latihan bagi siswa," ujarnya.

Terkait kesiapan ASPD, Samsuedi menyatakan, seluruh sekolah sudah siap. Artinya pada sisi perlengkapan ataupun sarana prasarana sudah cukup. Termasuk kelengkapan internet sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan ASPD.

" Sarana prasarana di masing-masing sekolah juga sudah siap menghadapi pelaksanaan ASPD," jelasnya.

(Ded)

Pelantikan Bupati Terpilih Tunggu Keputusan Gubernur

WONOSARI (KR) - Meskipun Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat kerja menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari 2025 tetapi di Gunungkidul hingga kini masih menunggu Keputusan Gubernur DIY.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih.

"Kami serahkan ke Gubernur apakah mengusulkan ke Mendagri untuk revisi Perpres atau tidak dan intinya kami menunggu," katanya Kamis (23/1).

Menurutnya dalam kesepakatan tersebut me-

nyebutkan bahwa pelantikan serentak kepala daerah terpilih dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 Oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara. Kecuali Provinsi DIY dan Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atas dasar peraturan perundang-undangan itu-lah maka keputusan pelantikan bupati terpilih menunggu keputusan Gu-



KR-Istimewa.

Endang Sri Sumiyartini

bernur DIY. Jika tidak ada revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala daerah terpilih di DIY periode 2025-2030, akan dijadwalkan tetap pada 10 Februari 2025 mendatang. Jika belum ada revisi

maka masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016. "Sehingga jadwal pelantikan dilakukan pada 10 Februari mendatang.

Sekretaris DPRD Gunungkidul, Purwono Sulistyohadi menambahkan, sesuai arahan Gubernur, pihaknya telah menyelesaikan proses verifikasi berkas usulan pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati untuk masa jabatan 2025-2030.

Untuk semua tahapan pelantikan kepala daerah terpilih sudah dilakukan. Tentang jadwal pelantikannya tentunya diserahkan ke Gubernur.

(Bmp)

TAHUN 2024 TERJADI 27 KASUS

Warga Diminta Waspada Penyebaran Leptospirosis

WONOSARI (KR) - Meskipun jumlah kasus mengalami penurunan tetapi kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit leptospirosis harus tetap dilakukan. Khusus tahun 2025 Dinas Kesehatan belum menemukan adanya kasus leptospirosis meskipun pada tahun 2024 jumlah kasus mencapai 27 kejadian. "Dari jumlah tersebut tidak ditemukan korban meninggal," kata Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul Ismono.

Berdasarkan data kasus yang terjadi untuk tren penyebaran leptospirosis banyak ditemukan di area pertanian. Hal ini terlihat dari temuan kasus dalam beberapa tahun terakhir srperti pada 2022 lalu tercatat ada 34 kasus, dengan kematian akibat leptospirosis sebanyak 5 orang. Tahun berikutnya, tercatat ada 84 kasus dengan menimbulkan kematian sebanyak 4 orang dan tahun 2024 ditemukan 27

dan tidak ditemukan adanya kasus kematian. Bahkan dibanding tahun sebelumnya untuk tahun 2024 jumlah kasus menurun drastis. Mereka yang terpapar penyakit leptospirosis adalah disebabkan oleh air kencing tikus ini. "Tahun 2024 lalu tidak ada yang meninggal," imbuhnya.

Keberhasilan menekan kasus leptospirosis Ini tentu berkat kerja sama semua pihak sehingga saat ada temuan bisa cepat tertangani dan tidak menimbulkan korban jiwa. Sedangkan berdasarkan data yang ada, penyakit ini banyak ditemukan di Kapanewon Nglipar, Semin, Karangmojo, Tanjungsari dan Tepus. Pihaknya meminta kepada Masyarakat untuk mewaspada potensi penyebaran leptospirosis. Pasalnya, penyakit ini juga memiliki tren peningkatan kasus pada saat musim penghujan.

"Kebersihan lingkungan serta

hewan-hewan yang berpotensi menyebarkan penyakit ini harus selalu fiesapada seperti kucing dan anjing diberikan vaksin," katanya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonosis, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Gunungkidul, Yuyun Ika Pratiwi mengatakan, Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans. Bakteri ini dapat menjangkiti manusia melalui hewan, seperti tikus, babi, kuda, sapi, anjing, dan kucing.

Ia menjelaskan, untuk mencegah leptospirosis bisa melakukan beberapa hal seperti menghindari berenang di air yang mungkin terkontaminasi urin hewan.

" Terutama setelah hujan atau banjir dan hindari kontak langsung dengan hewan yang mungkin terinfeksi " terangnya.

(Bmp)

PRODUKSI PADI 3,5 TON SEHEKTARE

Petani Salome Panen Padi dan Palawija



KR-Endar Widodo

Petani mulai panen padi, jagung dan kacang di lahan tumpangsari.

WONOSARI (KR) - Petani lahan kering dengan pola tanam tumpangsari mulai memanen padi, jagung dan kedelai. Seperti petani yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) Lestari Makmur, Pedukuhan Kotekan, Kalurahan Purwodari , Kapanewon Tepus sudah memanen padi jenis segreng seluas 20 hektar, produksi rata-rata satu hektare 3,5 ton gabah kering giling.

Untuk produksi jagung 6,6 ton gelondongan atau 3,3 ton pipil kering . Sementara untuk produksi kacang tanah 4 ton tiap hektare. Pola tum-

pangsari petani satu lahan ditanami padi, kacang , jagung serta ketela atau satu lobang rame-rame (salome).

"Alhamdulillah semua jenis tanaman dalam satu lahan tersebut produksinya bagus," kata Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul Ir Raharjo Yowono MSI didampingi Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kapanewon Tepus Edi Januari SDP, Selasa (22/1).

Pola tanam tumpangsari sudah lama diterapkan oleh petani lahan

kering. Seperti di Poktan Lestari Makmur dalam satu musim tanam, dalam satu hektare lahan yang sama menghasilkan, 3,5 ton gabah, 6,6 ton jagung dan 4 ton kacang. Kalau diperhitungkan dengan harga sekarang, petani sekali panen akan mendapatkan penghasilan total Rp 37 juta.

Ditambahkan oleh Ketua Tim Kegiatan Produksi Tanaman Pangan Danang Sutopo Shut, belum semua tanaman panen bulan Januari ini, seperti di zone tengah dan utara tanaman padi masih usia awal pembungaan (merkatak). Daerah yang sudah panen padi, mereka yang tanam Oktober 2024 dan varitas padi segreng dengan umur panen 105 hari.

Menurut catatan luas tanam padi di bulan Oktober mencapai 8.335 hektare, jagung, 8.845 hektare dan kacang tanah 1.292 hektare " Diperkirakan panen raya padi, jagung dan kacang awal Februari 2025," tambahnya.

(Ewi)

DPUPRKP BANGUN AKSES KE DAPUR

Anggaran 4 Sekolah Badan Gizi Nasional

WONOSARI (KR) - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul mengatakan, untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap awal 4 sekolah anggarannya masih dari Badan Gizi Nasional (BGN). Termasuk untuk pembuatan dapur masak, anggaran dari pusat.

Penggunaan anggaran dari daerah Belum menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Penggunaan anggaran daerah hingga sekarang belum ada petunjuk teknis dan peruntukannya.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) membangun akses jalan menuju dapur menggunakan anggaran pemeliharaan atau swakelola. "Untuk anggaran dari APBD Rp 12,23 miliar belum pedomannya," kata kepala BKAD Kabupten Gunungkidul Putro Sapto Wahyono SIP MT, Selasa (22/1).

Sekretaris DPUPRKP Ardi Wahyu

Nugroho SST MA, sesuai dengan permintaan, sudah melakukan pengaspalan dari jalan utama, jalan Kesatrian masuk Kodim 0730. Termasuk akses keluar masuk bahan makanan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempersiapkan Instalasi Pembuangan Limbah (IPAL), Dinas Kesehatan mengajukan pelatihan petugas kepada SPPG, pembuat makan harus steril dan sehat. Meski demikian tetap disiapkan anggaran kalau terjadi keracunan. Sebagaimana diketahui, pada tahap awal sasaran MBG baru 4 sekolah, SD Negeri Wonosari 1, SMPN 1 Wonosari, SMAN 1 Wonosari dan SMKN 3 Wonosari. Adapaun Pemkab Gunungkidul sudah menyiapkan anggaran dalam APBD sebesar Rp 12,23 miliar. Jumlah tersebut belum sesuai yang direncanakan Rp 26 miliar. "Kekurangan akan bahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)," tambah Pitro Sapto Wahyono.

(Ewi)

PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Dialokasikan Perbaikan Rp 4,9 Miliar, Sasaran 247 Unit

WONOSARI (KR) - Jumlah Penetapan Lokasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di Kabupaten Gunungkidul, sebanyak 21.758 unit dan yang sudah mendapatkan penanganan baru mencapai sekitar 4.800 unit. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, Nurgiyanto mengatakan tahun ini pihaknya mengalokasikan dana senilai Rp 4,9 miliar untuk perbaikan 247 unit RTLH di 44 kalurahan.

"Untuk progres penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Gunungkidul tergolong masih rendah di bawah 50 persen," katanya.

Alokasi dana tersebut, masing-masing unit akan mendapatkan bantuan senilai Rp 20 juta. Bantuan tersebut untuk memperbaiki kebutuhan dan tingkat kerusakan rumah tergantung dari kebutuhan dan tingkat kerusakan rumah.

Sehingga dilihat dari kebutuhan material yang dibutuhkan, masing-masing rumah berbeda kebutuhannya sesuai de-

ngan material lama yang masih bisa digunakan. Secara periodik target perbaikan RTLH pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang menyasar sebanyak 253 unit.

Sehingga jika dilihat dari periodik seharusnya setiap tahun target naik, tetapi tahun ini terjadi penurunan. "Karena sebanyak 7 unit ditangani Dinas Sosial yang berkaitannya dengan kemiskinan ekstrem," ucapnya.

Untuk mengentaskan masalah RTLH pihaknya sudah mencoba untuk melibatkan dari pihak ketiga. Namun, karena jumlah RTLH cukup banyak, sehingga membutuhkan waktu untuk mencakup keseluruhan.

Selain itu juga mengajak pihak lain, termasuk dari provinsi dan pusat. Sesuai dengan informasi bantuan RTLH tahun ini dari provinsi dan pusat juga akan turun. "Namun hingga kini kami belum tahu berapa unit yang akan direalisasi," ucapnya. (Bmp)